



**SEKRETARIAT JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270  
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925,  
WEBSITE : [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)

---

Nomor : 539/PI.03.02/VIII/2023 Jakarta, 29 Agustus 2023  
Lampiran : -  
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Internal atas  
Akuntabilitas Kinerja Instansi  
Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 di  
Badan Keahlian Sekretariat Jenderal  
DPR RI

Yth. Kepala Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Berdasarkan Surat Tugas Inspektur II Nomor: 250/PI.03.02/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023 dengan hormat Kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 di Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI dengan uraian sebagai berikut:

#### **1. Pendahuluan**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2643/SEKJEN/2022 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Sekretariat Jenderal DPR RI, maka Inspektorat II telah melakukan Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja di Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2023.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana akuntabilitas kinerja di Badan Keahlian Setjen DPR RI dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Khususnya bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), menilai tingkat implementasi SAKIP, menilai tingkat akuntabilitas kinerja, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP, dan memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. Evaluasi SAKIP merupakan bagian dari siklus manajemen kinerja instansi pemerintah/unit kerja yang dilaksanakan untuk mendorong unit kerja untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

Ruang lingkup evaluasi internal adalah melakukan penilaian atas:

- a. Kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- b. Pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- c. Pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya

- perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja yang dapat memberikan dampak dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja;
- e. Capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya.

Pelaksanaan evaluasi internal di Badan Keahlian Setjen DPR RI menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif berdasarkan peraturan, disesuaikan dengan tujuan dan mempertimbangkan kendala yang ada.

## 2. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi internal atas akuntabilitas kinerja di Badan Keahlian Tahun 2023 menunjukkan nilai “73,25” dengan predikat “BB. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2022	2023
1.	Perencanaan Kinerja	30	22,80	22,80
2.	Pengukuran Kinerja	30	21,00	20,70
3.	Pelaporan Kinerja	15	9,15	11,25
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,75	18,50
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>		<b>100</b>	<b>68,70</b>	<b>73,25</b>
<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>			<b>B</b>	<b>BB</b>

**Kami sungguh mengapresiasi pencapaian tingkat akuntabilitas kinerja di Badan Keahlian dengan perolehan predikat BB pada Tahun 2023.** Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi internal akuntabilitas kinerja pada Badan Keahlian Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

### a. Perencanaan Kinerja

Telah terdapat dokumen perencanaan kinerja berupa Rencana Strategis (Renstra) Eselon I, Buku Indikator Kinerja Utama (IKU). Perjanjian Kinerja (PK) Eselon I, Rencana Aksi (Renaksi) Eselon I, dan telah diformalkan. Kegiatan dalam perencanaan kinerja telah sesuai dengan perencanaan pengajuan anggaran, atas perencanaan tersebut juga telah dilakukan pemantauan.

**Selain itu, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja, sebagai berikut:**

- 1) Belum terdapat keselarasan dokumen perencanaan kinerja yang menggambarkan hubungan yang berkesinambungan antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*cascading*).
- 2) Belum terdapat keselarasan perencanaan kinerja yang memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*crosscutting*).

### b. Pengukuran Kinerja

Badan Keahlian Setjen DPR RI telah melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang sampai ke tingkat individu. Reviu anggaran sudah dilaksanakan

berdasarkan pengukuran capaian kinerja dan terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja. Namun belum dilakukan kegiatan reviu atas:

- 1) Renstra.
- 2) Rencana aksi (Renaksi) berdasarkan pengukuran kinerja.
- 3) RAB berdasarkan pengukuran kinerja.

Selain itu monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Badan Keahlian masih dilakukan per semester, dan masih belum dilakukan bulanan.

#### **c. Pelaporan Kinerja**

Badan Keahlian Setjen DPR RI telah menyusun laporan kinerja, telah direviu oleh APIP, dan secara keseluruhan kualitas laporan kinerja telah disusun dengan baik sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyampaian Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Sekretariat Jenderal DPR RI. Laporan kinerja sudah memuat evaluasi pencapaian kinerja, dan telah dilakukan reviu atas hasil capaian kinerja pada laporan kinerja tahun sebelumnya sebagai dasar reviu anggaran. Namun belum terdapat reviu RAB berdasarkan capaian kinerja.

**Selain itu, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja, sebagai berikut:**

- 1) Belum dilakukan reviu Renaksi.

#### **d. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya**

Berdasarkan Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Internal, hasil evaluasi internal tahun sebelumnya, belum seluruhnya dijadikan dasar sebagai perbaikan kinerja di Badan Keahlian Setjen DPR RI, yaitu:

- 1) Menjadikan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar revisi atas penyesuaian strategi dan kebijakan dalam dokumen perencanaan serta dasar atas penyesuaian rencana aksi kegiatan dan anggaran.
- 2) Melakukan reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Eselon I dan II Badan Keahlian.
- 3) Menjadikan hasil capaian, hambatan dan rekomendasi dalam LAK sebagai dasar dalam penyesuaian aktivitas, anggaran dan Renaksi untuk mencapai kinerja dalam PK berikutnya.
- 4) Menyusun laporan tindak lanjut terhadap rekomendasi evaluasi atas AKIP internal.
- 5) Melakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi evaluasi AKIP internal.

### **3. Rekomendasi**

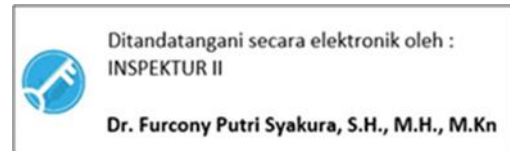
Berdasarkan uraian di atas, Kami merekomendasikan kepada Badan Keahlian DPR RI untuk:

- a. Menyelaraskan dokumen perencanaan kinerja yang menggambarkan hubungan yang berkesinambungan antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*cascading*).
- b. Menyelaraskan perencanaan kinerja yang memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*crosscutting*).

- c. Melakukan reuiu pada :
  - 1) Renstra.
  - 2) Renaksi.
  - 3) RAB.
- d. Monitoring dan evaluasi atas Renaksi tiap bulannya.
- e. Melaksanakan seluruh tindak lanjut hasil evaluasi internal sebagai bentuk upaya perbaikan kinerja di Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI.

Demikian disampaikan hasil evaluasi SAKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami sangat menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 29 Agustus 2023



Tembusan:

1. Plh. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi;
  2. Kepala Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi Reformasi Birokrasi.
- Sekretariat Jenderal DPR RI.